

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perekonomian akan meningkat seiring dengan pertambahan penduduk di suatu negara adalah sektor konstruksi, sektor ini terus berkembang sejalan dengan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara, sebagai salah satu sektor faktor pendukung dijalankannya sektor ekonomi lainnya. Agar pembangunan di negara kita tetap berjalan, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar untuk meningkatkan pembangunan. Salah satu dapat mewujudkan negara semakin berkembang adalah pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan juga sebagai sumber pendapatan negara untuk mewujudkan negara yang lebih baik.

Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia ialah Pajak Penghasilan (PPh). Dari sekian banyak wajib pajak, jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana. Untuk peraturan pajak atas usaha jasa konstruksi ini memiliki aturan khusus, yaitu pengenaan pajaknya berbeda dengan pengenaan pajak yang biasa dikenakan pada wajib pajak badan lainnya. Peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini dibahas lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi. Berbagai peraturan maupun Undang-Undang mengenai jasa konstruksi diatur khusus oleh Pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan

budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, dalam hal ini pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Usaha jasa konstruksi meliputi tiga kelompok yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini berbeda-beda, dilihat menurut kepemilikan sertifikat badan usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut. Untuk jasa pelaksana konstruksi, tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan dari kewenangan kontraktor. Tarif PPh final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yaitu 4% untuk jasa perencanaan konstruksi apabila seorang kontraktor memiliki sertifikat badan usaha, dan 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Untuk jasa pelaksanaan konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha yang masuk dalam kategori usaha kecil (tingkatan 1,2,3,4) dikenakan tarif 2%, sedangkan untuk kontraktor yang memiliki sertifikat badan usaha yang masuk dalam kategori usaha menengah dan besar (tingkatan 5,6,7) dan apabila kontraktor tidak memiliki sertifikat badan usaha maka tarif yang dikenakan yaitu sebesar 4%. Untuk jasa pengawasan konstruksi dikenakan tarif 4% bagi kontraktor yang memiliki sertifikat badan usaha dan 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Nilai pajak penghasilan bisa dihitung

menggunakan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dari usaha jasa konstruksi yang dikalikan dengan tarif pajak yang akan dikenakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang diajukan yaitu, bagaimana mekanisme penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan ini peneliti membatasi permasalahan yang diteliti agar lebih terarah guna untuk mempermudah kajian lebih lanjut agar sesuai dengan tujuan dan manfaat yang akan dicapai, mengenai mekanisme perlakuan perpajakan berdasarkan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menambah referensi mengenai Mekanisme Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

1) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo dalam merencanakan, mendesain, mengukur, mengimplemen-tasikan, menganalisis dan mengoperasikan serta dapat memelihara kualitas jasa yang diberikan baik yang menguntungkan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

2) Bagi Penulis

Penulis banyak mendapat tambahan ilmu khususnya yang berkaitan dengan Mekanisme Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

3) Bagi Program Studi

Perguruan Tinggi sebagai bahan kegiatan dalam pengembangan pembelajaran maupun upaya melakukan edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

